

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

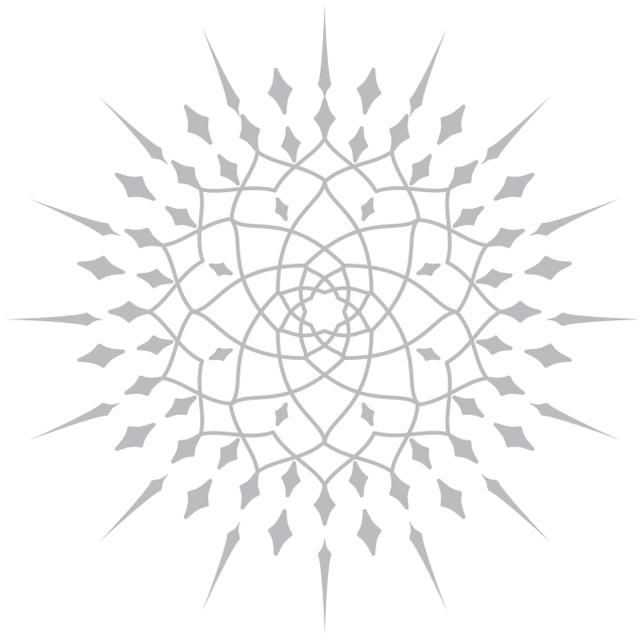
Volume I, Nomor 1, Juni 2012/1433

ISSN 2301-9166



Jurnal

Pendidikan Islam



**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

JURNAL PENDIDIKAN ISLAM

Ketua Penyunting

Imam Machali

Anggota Penyunting

Sukiman

Sri Sumarni

Sabarudin

Karwadi

Na'imah

Zainal Arifin

Andi Prastowo

Sigit Prasetyo

Rohinah

Tata Usaha

Siti Latifah

Sofa Faizin

Distribusi

Maryono

Marwanto

Jurnal Pendidikan Islam (JPI) terbit dua kali dalam setahun oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada bulan Juni dan Desember.

Redaksi menerima naskah seputar Pendidikan Islam dalam berbagai perspektif sesuai dengan visi, misi dan ketentuan redaksi.

Alamat Redaksi:

Jurnal Pendidikan Islam (JPI)

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Lt. III Ruang 315

UIN Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Indonesia

Telp. +62-274-513056

E-mail: jurnaljpi@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INKLUSIF-MULTIKULTURAL Mahmud Arif	1
BASIS EPISTEMOLOGI DALAM PENDIDIKAN ISLAM Imam Hanafi	19
FENOMENA PENDIDIKAN ELITIS DALAM SEKOLAH/MADRASAH UNGGULAN BERSTANDAR INTERNASIONAL Andi Prastowo	31
URGENSI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS MULTIKULTURAL DI SEKOLAH Erlan Muliadi	55
KETUNTASAN BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PAI MELALUI METODE KISAH Pandi Kuswoyo	69
PENDIDIKAN MULTIKULTURAL-RELIGIUS UNTUK MEWUJUD- KAN KARAKTER PESERTA DIDIK YANG HUMANIS-RELIGIUS Zainal Arifin	89
PARADIGMA PENDIDIKAN AGAMA INTEGRATIF-TRANSFORMATIF Ibnu Rusydi	105
DEKONSTRUKSI PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI SUBSISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Suyatno	121

FENOMENA PENDIDIKAN ELITIS DALAM SEKOLAH/MADRASAH UNGGULAN BERSTANDAR INTERNASIONAL

Andi Prastowo

Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
e-mail: anditarbiyah@gmail.com

Abstract

This article aims to review and discuss the phenomenon of eminent school/ madrasah in international standard in Indonesia that has a tendency to be elitist and reproductive force is not productive force. There are two formulations of problem studied in this article, namely how the elitism emerges in the eminent school / madrasah in international standard? Then, how to recommend the eminent school / madrasah in order to ensure equitable access of education for all children throughout the community of nations, especially among the poor?

Keywords: *elitist education, excellent schools/madrasah*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan mendiskusikan fenomena sekolah/ madrasah unggulan berstandar internasional di Indonesia yang memiliki kecenderungan elitis dan menjadi *reproductive force* bukan *productive force*. Ada dua rumusan masalah yang dikaji dalam artikel ini, yaitu bagaimana elitisme itu muncul dalam sekolah/madrasah unggulan berstandar internasional? Kemudian, bagaimana cara merekonstruksi sekolah/madrasah unggulan tersebut agar dapat menjamin akses pendidikan yang berkeadilan bagi semua anak bangsa dari seluruh kalangan masyarakat, terutama kalangan rakyat miskin?

Kata Kunci: pendidikan elitis, sekolah/madrasah unggulan

Pendahuluan

Pendidikan nasional adalah salah satu sarana pemerintah untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara, sebagaimana diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: "...mencerdaskan kehidupan bangsa". Namun, apakah setelah kurang lebih 67 tahun kemerdekaan ini masyarakat Indonesia telah menjadi cerdas? Dan, apakah semua masyarakat Indonesia telah mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak dari pemerintah? Alasannya, hal itu sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar RI Pasal 31 yang berbunyi, "(1) Setiap warga negara berhak memperoleh pengajaran, dan (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-Undang."¹

Diungkapkan oleh Bahrudin bahwa menurut laporan PBB dalam *Human Development Report 2004* kualitas pendidikan Indonesia (*Education Index*= 0,80) berada di bawah Vietnam (0,82) atau terendah di antara negara-negara ASEAN lainnya. Terlebih dari penelitiannya UNESCO-OECD dalam Programme of International Student Assessment (PISA), kecakapan membaca anak-anak Indonesia (usia 15 tahun) sangatlah rendah (peringkat 39 dari 41 negara yang diteliti).²

Kemudian, ditambahkan oleh Ngainun Naim mengutip laporan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) yang mengumumkan mengenai Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*), yang termasuk di dalamnya adalah Indeks Pembangunan Manusia (HDI) pada tahun 2007, bahwa posisi Indonesia disebutkan berada di peringkat 112 dari 175 negara yang ada di dunia. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan karena posisi Indonesia hanya sedikit di atas Kamboja (130), Myanmar yang senantiasa dirundung konflik (131) dan Laos (135). Sedangkan posisi negara ASEAN lainnya berada jauh di atas Indonesia, termasuk Vietnam yang berada di peringkat 109.³

Hal tersebut juga tampaknya selaras dengan kualitas SDM dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Indonesia juga berada di peringkat ke 112 dari 154 negara di dunia, sementara Vietnam ada di peringkat ke-96, Malaysia di peringkat ke-56 dan Philipina di peringkat ke-76.⁴

1 H. Soedijarto, "Pendidikan yang "Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia", dalam A. Ferry T. Indratno, *Kurikulum yang Mencerdaskan: Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), hlm. 10-11

2 Bahrudin, "Pendidikan untuk Keberdayaan Desa", dalam A. Ferry T. Indratno, *Kurikulum yang Mencerdaskan: Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), hlm. 159

3 Ngainun Naim, *Rekonstruksi Pendidikan Nasional: Membangun Paradigma yang Mencerahkan* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 6-7

4 *Ibid.*, hlm. 7

Di sisi lain, Darmaningtyas menyatakan bahwa di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, permasalahan muncul sebagai akibat besarnya subsidi yang diperuntukkan bagi orang-orang miskin, sedangkan di negara-negara miskin, seperti Indonesia, permasalahannya terletak pada ketidakadilan dalam memperoleh akses pendidikan antara orang kaya dan orang miskin. Realitasnya, biaya menyekolahkan anak kaya maupun miskin dalam sistem pendidikan formal itu sama, bahkan cenderung lebih mahal bagi kaum miskin. Hal ini disebabkan, sekolah-sekolah negeri yang 90 persen pembiayaannya ditanggung oleh negara justru diduduki oleh mayoritas anak-anak orang kaya (kelas menengah). Sebaliknya, anak-anak buruh pabrik, buruh kasar, buruh bangunan, nelayan, pemulung, buruh tani, petani, dan lain-lain justru bersekolah di sekolah-sekolah swasta kecil, yang 90 persen pembiayaannya ditanggung sendiri. Dengan demikian, orang-orang kaya di Indonesia justru membayar biaya pendidikan lebih kecil dibanding orang-orang miskin yang harus membayar biaya pendidikan jauh lebih banyak.⁵

Dan, jika mengamati kondisi pendidikan Islam di Indonesia sekarang, terutama dalam konteks kemadrasahan, mayoritas ternyata lembaga pendidikan tersebut adalah madrasah swasta, bukan madrasah negeri, dengan orang tua wali murid dari keluarga miskin, bukan keluarga kaya. Hal ini seperti tampak dari laporan Direktorat Pendidikan Madrasah pada tahun 2006, di tingkat MI dari total 22.189 madrasah 92,9 % adalah MI Swasta dan 7,1 % adalah MI Negeri, di tingkat MTs dari total 12.619 madrasah 90 % MTs Swasta dan 10 % MTs Negeri, dan tak jauh berbeda dengan kondisi di MTs, di jenjang MA dari total 5043 madrasah yang ada, 87,2 % adalah MA Swasta dan 12,8 % adalah MA Negeri. Kemudian, dari segi penghasilan orang tua siswa madrasah, dari total 26.075.210 orang tua siswa 42,18 % berpenghasilan tidak tentu, 43,75 % berpenghasilan di bawah Rp. 1 juta, dan yang berpenghasilan 1-2 juta tidak lebih dari 10,4 %, sedangkan yang penghasilan 2 juta ke atas hanya sejumlah 3,6 %.⁶

Data awal tersebut kalau menggunakan tesis Darmaningtyas di atas bahwa jika sekolah/madrasah negeri mayoritas didominasi oleh orang-orang kaya, sedangkan sekolah/madrasah swasta didominasi oleh orang-orang miskin, maka kondisi pendidikan madrasah tersebut adalah gambaran ketidakadilan dalam memperoleh akses pendidikan antara orang kaya dan orang miskin di dalam pendidikan Islam di Indonesia. Ini tentu bukanlah yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, karena negara sesungguhnya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali, dan semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan, meskipun ia miskin. Selain itu, paparan data yang diungkapkan

5 Darmaningtyas, *Pendidikan Rusak-Rusakan*, (Yogyakarta: LkiS, 2009), Cet. IV, hlm. 326

6 Direktorat Pendidikan Madrasah, "Arah Kebijakan Pengembangan Madrasah di Indonesia", *Laporan Ditpenmad Dit PI*, 2006.

oleh Direktorat Pendidikan Madrasah di atas menunjukkan pula bahwa kondisi pendidikan Islam di Indonesia masihlah jauh dari kualitas yang diharapkan.

Namun, meskipun mayoritas kualitas lembaga pendidikan Islam masihlah rendah, selama dua dekade terakhir ini, lembaga-lembaga tersebut sesungguhnya telah menunjukkan perkembangannya yang signifikan pada beberapa kasus, bahkan menjadi sekolah/madrasah terbaik di daerahnya mengalahkan sekolah umum, seperti Madrasah Insan Cendikia dan al-Azhar di Jakarta, Madrasah Pembangunan UIN Jakarta, SD Sabili Malang, MIN Malang I Jawa Timur, Sumatra Thawalib di Padang Panjang, dan SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Sebagai lembaga pendidikan unggul dan menjadi favorit pilihan masyarakat, lembaga pendidikan Islam tersebut telah menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat Indonesia.⁷

Namun, kembali lagi, sekolah (Islam) atau madrasah-madrasah unggulan tersebut masih saja sulit “kalau bukan sebatas hanya mimpi” bagi orang miskin dan tidak cerdas untuk masuk ke lembaga tersebut. Karena, untuk bisa mengenyam pendidikan berkualitas unggul di sekolah/madrasah unggulan berstandar internasional ada banyak syarat yang mesti dipenuhi. Sebagai contoh, di SDIBI (Sekolah Dasar Islam Berstandar Internasional) al-Azhar 1 di Jakarta syarat yang mesti dipenuhi di antaranya⁸: 1). Usia minimal 5 tahun 10 bulan, telah mandiri dan matangseseuai usia perkembangan, 2). Menyertakan hasil psikotes (IQ, bakat dan minat), 3). Menyertakan BLP TK B Semester I Tahun Pelajaran 2008/2009, dengan nilai rata-rata B pada perkembangan Kognitif, afektif dan psikomotorik, 4). Menyerahkan foto copy Akte Kelahiran, 5). Mengikuti tes seleksi PMB, kompetensi yang diujikan : keterampilan berfikir; kemampuan visual dan auditory; kemampuan motorik kasar dan halus; kemampuan social emosional; kemampuan berbahasa (bahasa Indonesia dan Inggris); dan pengetahuan agama dan Al-Qur’an

Kemudian, di MI Pembangunan Ciputat, calon peserta didik baru harus mengikuti tes seleksi masuk (tes kesiapan belajar).⁹ Kalau di MIN I Malang, selain orang tua harus membayar biaya seleksi sebesar Rp. 150.000, calon peserta didik baru harus mengikuti tes seleksi yang meliputi: psikotes dan tes akademik (yang meliputi: membaca, menulis, dan berhitung).¹⁰ Dan bagi calon peserta didik baru yang ingin mendaftar di SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta diberikan

7 Agus Maimun dan Agus Zaenul Fitri, *Madrasah Unggulan: Lembaga Pendidikan Alternatif di Era Kompetitif*, (Malang: UIN Malang Press, 2010), hlm. 30-31

8 Diakses dari http://www.al-azhar.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=94:sd-islam-al-azhar-1&catid=106:sd-islam-al-azhar&Itemid=82. [9 Desember 2011]

9 Diakses dari <http://www.mpuin-jkt.sch.id/content/view/37/170/>. [9 Desember 2011].

10 Diakses dari <http://minmalang1.net/pmb.php>. [9 Desember 2011]

kesempatan untuk memilih jalur pendaftaran yang diinginkan, yaitu apakah jalur umum (reguler) atau khusus (RSBI). Konsekuensinya pun berbeda. Bagi calon peserta didik baru yang melalui pendaftaran umum, maka mereka harus mengambil formulir pendaftaran seharga Rp. 35.000, - dan bagi pendaftar yang melalui jalur khusus (RSBI) harus membayar biaya sejumlah Rp. 250.000, - untuk biaya tes psikologi (psikotes), tes kemampuan akademik, dan tes kesehatan.¹¹

Menurut Darmaningtyas, sistem seleksi siswa baru yang didasarkan pada besaran angka NEM atau tes-tes seleksi yang lainnya yang memperlihatkan capaian angka tertinggi tersebut adalah sumber ketidakadilan dalam mengakses pendidikan yang bermutu. Karena, prasyarat untuk mencapai angka tertinggi itu adalah fasilitas-fasilitas belajar yang lengkap dan makanan yang bergizi sehingga anak tersebut menjadi cerdas. Kedua prasyarat itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang secara ekonomis mampu. Orang-orang miskin, karena sejak awal gizinya tidak terpenuhi dan fasilitas belajarnya tidak mendukung, kemudian memperoleh nilai rendah atau tidak bisa mendapatkan nilai tertinggi dalam seleksi masuk siswa baru. Akibatnya, mereka tidak lulus seleksi masuk ke sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah negeri yang biayanya sebagian besar ditanggung oleh negara. Sampai sekarang, ungkap Darmaningtyas, belum pernah ada kebijakan seleksi masuk ke sekolah-sekolah formal yang didasarkan pada kemampuan sosial ekonomi calon murid. Akibatnya, sampai sekarang kita belum melihat tanda-tanda berakhirnya ketidakadilan tersebut. Yang kaya masih tetap membayar kecil, yang miskin tetap membayar lebih banyak.¹²

Sementara itu, yang terjadi di sekolah-sekolah/madrasah-madrasah swasta unggulan dan terkenal pun demikian, imbuh Darmaningtyas. Di sana ada sistem seleksi baik yang menggunakan NEM maupun tes kemampuan. Namun, di balik keduanya, sesungguhnya terselip angka rupiah yang dapat dinegosiasikan sebagai syarat masuk. Sehingga apabila dalam suatu proses seleksi terdapat calon murid yang memiliki NEM atau hasil tes lainnya sama, maka yang diterima adalah mereka yang mampu membayar lebih tinggi kepada sekolah/madrasah tersebut. Di sini, sekolah/madrasah telah menjadi ladang bisnis bagi pengelolanya atas nama kemanusiaan dan bukan lagi sebagai panggilan sosial, sebagaimana dicita-citakan sejak awal ketika mendirikan sekolah/madrasah tersebut.¹³

Apabila ditilik dari latar belakang kemunculan sekolah/madrasah unggulan dan berstandar internasional tersebut, menurut Maimun dan Zaenul Fitri,¹⁴ dapat

11 Diakses dari <http://psb.sdmuhsapen-yog.sch.id/content.php?id=91>. [9 Desember 2011]

12 Darmaningtyas, *Pendidikan Rusak-Rusakan*, hlm. 326

13 *Ibid.*, hlm. 327

14 Agus Maimun dan Agus Zaenul Fitri, *Madrasah Unggulan: Lembaga Pendidikan Alternatif di Era Kompetitif*, hlm. 22

ditelusuri melalui Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dalam pembukaannya yang secara jelas diungkapkan bahwa alasan didirikannya negara untuk: (1) mempertahankan bangsa dan tanah air, (2) meningkatkan kesejahteraan rakyat, (3) *mencerdaskan* kehidupan bangsa, dan (4) ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia yang abadi dan berkelanjutan. Konsep pencerdasan kehidupan bangsa ini berlaku bagi semua komponen bangsa. Hal ini juga ditegaskan dalam UUD 1945 pada pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia.

Secara sosiologis, kemunculan madrasah unggulan adalah sebuah keniscayaan di saat kebutuhan masyarakat saat ini adalah mencari segala hal yang serba berkualitas unggul. Dengan lembaga (madrasah) yang unggul sebagai proses pemilihan lembaga pendidikan yakni tempat menempa diri anak dalam menyongsong masa depan yang memiliki sikap profesional dalam kehidupan, sehingga masyarakat yang sudah sadar dan profesional dalam kehidupan, akan memilih madrasah yang baik (unggul) dan berani berkorban demi anaknya secara maksimal dan optimal.¹⁵

Ada tiga hal penting, kata Rachman sebagaimana dikutip Maemun dan Fitri, dalam madrasah yang baik (unggul), yaitu: (1) masukan anak didiknya diunggulkan (*input*), (2) proses pembinaannya yang diunggulkan, dan (3) hasil atau produk anak (*output*) yang diunggulkan. Kemudian, menurut Mutrofin sebagaimana dikutip Maemun dan Fitri, bahwa indikator madrasah unggul adalah madrasah yang cenderung memudahkan lulusannya melangkah ke jenjang pendidikan berikutnya secara vertikal. Mempermudah lulusannya mendapatkan pekerjaan dan secara sosial mengangkat prestise pergaulannya. Dan, sedikit lebih ideal, indikator madrasah unggul adalah madrasah yang secara optimal dapat mengaktualisasikan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didiknya. Dari bodoh menjadi pintar, dari tumpul menjadi kreatif, dari kurang adab menjadi beradab. Atau dengan kata lain, madrasah unggul adalah mendidik manusia paripurna, utuh lahir dan batin.¹⁶

Namun, di satu sisi yang lain, kata Dadang S. Anshori,¹⁷ munculnya madrasah unggulan juga akan menimbulkan persoalan di antaranya: *pertama*, kesenjangan kualitas antar madrasah yang mencolok pada saat ini, akan melahirkan daya saing yang tidak seimbang dalam perolehan kesempatan berusaha dan

15 *Ibid.*, hlm. 27-28

16 Agus Maimun dan Agus Zaenul Fitri, *Madrasah Unggulan: Lembaga Pendidikan Alternatif di Era Kompetitif*, hlm. 29

17 *Ibid.*, hlm. 28

bekerja, dan *kedua*, bermunculannya madrasah unggul justru dikhawatirkan tidak sebagai manifestasi sebuah kesadaran perlunya manusia yang berkualitas di masa mendatang, melainkan menjadikan pendidikan sebagai bagian dari liberalisme ekonomi.

Meskipun pandangan di atas, kata Agus Maimun dan Agus Zaenul Fitri dianggap tidak selamanya benar, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kemunculan madrasah unggulan sebagai pranata sosial akan memunculkan elitisme pendidikan sebagai fungsi laten¹⁸-nya adalah sesuatu yang tidak bisa dinafikan.

Elitisme adalah sebuah konsep yang berasal dari kata “elite” yang berarti “kelompok kecil orang-orang yang mempunyai derajat tinggi, orang-orang terhormat; orang-orang terbaik; sesuatu yang dianggap paling baik atau mewah (tentang sesuatu benda atau barang)”.¹⁹ Elitisme adalah sebuah paham atau ideologi atau “isme” tentang kalangan elite. Dengan kata lain, maksud elitisme pendidikan di sini adalah suatu pandangan yang melihat bahwa pendidikan itu hanyalah hak dan otoritas orang-orang elite saja, bukan orang-orang kecil dan terpinggirkan. Sementara pendidikan elitis adalah suatu bentuk pendidikan yang hanya diperuntukkan bagi kalangan terbatas yaitu kalangan “elite” saja.

Hal itu diperkuat oleh pendapat Ariel Haryanto yang menyatakan bahwa dalam proses transformasi sosial sebagian pihak yang sudah kuat dan sudah diuntungkan oleh kondisi sosial akan menjadi lebih kuat dan berjaya. Sebagian besar yang lain dirugikan, bukannya karena tidak mendapatkan bangku sekolah (kesempatan itu secara formal semakin terbuka pada banyak orang), tetapi karena kualitas dan kategori pendidikan yang mereka peroleh di jenjang terbawah dari sebuah diskriminasi kelas yang baru. Bagi kelas borjuisi yang baru tumbuh di Indonesia, dan kelas menengah kota yang berbakat, perubahan yang sedang terjadi boleh jadi merupakan sebuah proses pemerdekaan, kemajuan, perkembangan, dan peluang emas. Paling tidak proses itu merupakan pembebasan dari beban yang tidak pernah dibutuhkannya.²⁰

18 Fungsi laten adalah satu dari dua sifat dari fungsi yang dikonsepsikan oleh Merton. Satu yang lainnya, yaitu fungsi manifes. Fungsi laten adalah fungsi yang tidak diharapkan. Sedangkan fungsi manifes adalah fungsi yang diharapkan (*intended*). Konsep fungsi ini adalah salah satu penjabaran dari teori fungsionalisme struktural, suatu teori yang menyatakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Selengkapnya lihat George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Diterjemahkan oleh: Alimandan (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 21-23

19 Eka Yani Erfina, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Terbaru* (Surabaya: Tiga Dua, t.th), hlm. 103.

20 Ariel Heryanto, “Industrialisasi Pendidikan: Berkah, Tantangan, atau Ancaman bagi Indonesia?” dalam Sindhunata (Ed.), *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokrasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 46

Dan, dalam pandangan Heryanto yang lain, kelas sosial tidak hanya ditentukan oleh pemilikan modal keuangan, tetapi juga pengetahuan, ijazah, serta selera budaya. Wallerstein juga mengingatkan bahwa di mana pun di dunia, tidak ada sekolah/madrasah yang sepenuhnya terbuka dan menampung semua anak usia sekolah di masyarakatnya. Dengan berbagai dalih (seperti ujian saringan), sekolah akan mempertahankan sebuah pintu yang tertutup bagi kelas tertindas.²¹ Apalagi jika mencermati kondisi yang terjadi pada sekolah/madrasah unggulan demikian (seperti tersebut di awal), maka akan sangat sulit kiranya bagi lembaga pendidikan Islam ini untuk mampu menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan merata bagi semua anak di negeri ini. Tampaknya, kalangan khusus atau “elit” inilah yang mungkin paling punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan unggul tersebut. Dan, bagi anak-anak dari kalangan masyarakat pinggir dan miskin, untuk bisa masuk ke sekolah/madrasah unggulan tersebut, mungkin tinggal cita-cita belaka.

Menurut studi yang dilakukan Bowles dan Gintis sebagaimana dikutip Nuryatno, memang ada sebuah petunjuk kuat bahwa ada relasi antara sekolah dan ketidakadilan sosial atau antara sekolah dan reproduksi sosial. Sebagai argumentasi, hampir semua kasus menunjukkan bahwa mayoritas anak-anak dari golongan kelas menengah atas akan masuk ke dalam golongan kelas sosial yang sama ketika mereka nanti beranjak dewasa. Sebaliknya, anak dari masyarakat bawah akan juga kembali ke posisi kelas sosial semula ketika mereka nanti dewasa. Hal ini disebabkan karena anak-anak menengah-atas mempunyai kapital dan modal untuk mendapatkan pendidikan yang bagus dengan fasilitas yang sangat memadai. Sementara anak-anak dari masyarakat bawah tidak atau jarang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan seperti itu. Mayoritas mereka hanya memperoleh pendidikan pas-pasan dengan fasilitas yang tidak memadai. Dengan mendapatkan kualitas pendidikan seperti itu tentulah mereka ketika dewasa akan mendapatkan kesempatan yang besar untuk kembali ke kelas sosialnya semula. Dengan demikian, sesungguhnya sekolah mempunyai kontribusi dalam mereproduksi posisi anak didik dan mempertahankan hirarki kelas sosial di masyarakat.²²

Dari paparan beberapa fakta, pendapat, dan asumsi di atas maka dinilai penting untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang fenomena pendidikan elitis dalam sekolah/madrasah unggulan berstandar internasional di Indonesia. Untuk itu, pokok masalah akan ditelaah dengan menggunakan perspektif sosiologis dengan melakukan studi literatur atau kepustakaan. Adapun setelah dijabarkan dari pokok masalah di atas, maka beberapa rumusan masalah yang akan menjadi fokus

21 Ariel Heryanto, “Industrialisasi Pendidikan: Berkah, Tantangan, atau Ancaman bagi Indonesia?”, hlm. 46

22 M. Agus Nuryatno, *Mazhab Pendidikan Kritis: Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Resist Book, 2008), hlm. 62

kajian makalah ini adalah sebagai berikut: bagaimana elitisme itu muncul dalam sekolah/madrasah unggulan berstandar internasional? Kemudian, bagaimana cara merekonstruksi sekolah/madrasah unggulan tersebut agar dapat menjamin akses pendidikan yang merata (bukan elitis) bagi setiap anak bangsa dari seluruh kalangan masyarakat, terutama kalangan masyarakat miskin? Berpijak dari dua rumusan masalah tersebutlah kajian dalam makalah ini dilakukan.

Pendidikan Elitis dalam Perkembangan Sekolah/Madrasah Unggulan SBI

Sekolah/madrasah unggulan muncul berangkat dari keinginan untuk menciptakan madrasah yang menjadi *center of excellence* (pusat keunggulan) untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap pakai di masa depan. Hal ini dikarenakan, selama ini tampak bahwa mutu pendidikan nasional belum merata. Adanya madrasah unggulan, kata Maimun dan Fitri, dapat membekali peserta didik dengan pengalaman belajar yang berkualitas, dengan sendirinya mereka mempunyai peluang yang lebih besar untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan pilihannya.²³

Maemun dan Fitri juga menyatakan bahwa, sekolah/madrasah unggulan dipandang memiliki peluang besar untuk memenuhi tuntutan masyarakat dengan beberapa alasan sebagai berikut: *pertama*, terjadinya mobilitas sosial (yakni munculnya masyarakat menengah baru terutama kaum intelektual yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan pesat), *kedua*, munculnya kesadaran baru dalam beragama (santrinisasi), terutama pada masyarakat perkotaan kelompok menengah atas, sebagai akibat dari proses re-islamisasi yang dilakukan secara intens oleh organisasi-organisasi keagamaan, lembaga-lembaga dakwah atau yang dilakukan secara perorangan, dan *ketiga*, yaitu arus globalisasi dan modernisasi yang demikian cepat perlu disikapi secara arif.²⁴

Namun, untuk alasan pertama di atas pada khususnya, menurut teori reproduksi sosial atau korespondensi sebagaimana digagas oleh Bowles dan Herbert Gintis, sebagaimana dikutip Nuryatno, sulit diterima, karena sekolah hanya melayani kepentingan masyarakat dominan dan melanggengkan struktur sosial yang ada. Seperti dalam argumentasi teori ini bahwa nilai-nilai dan prakek-pratek sekolah pada dasarnya adalah cermin dari organisasi ekonomi. Dengan demikian, dalam kenyataannya, seperti di Indonesia, Nuryatno mengungkapkan bahwa hal ini sangat kasat mata. Betapa pendidikan kita berpihak kepada mereka yang punya kapital. Hanya mereka yang punya uang yang bisa menikmati pendidikan yang

23 Agus Maimun dan Agus Zaenul Fitri, *Madrasah Unggulan: Lembaga Pendidikan Alternatif di Era Kompetitif*, hlm. 10-11

24 *Ibid.*, hlm. 11-12

bagus dan memadai. Sementara orang miskin dan tidak mampu jangan berharap dapat pendidikan yang bagus.²⁵

Sementara itu, perkembangan sekolah/madrasah unggulan ini tentunya tidak bisa dipisahkan dari program sekolah/madrasah berstandar internasional yang dicanangkan pemerintah. Seperti diungkapkan oleh Zainal Aqib bahwa penyelenggaraan pendidikan yang berstandar internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah selanjutnya disebut dengan Sekolah Berstandar Internasional (SBI) dilatar belakangi oleh alasan-alasan sebagai berikut:²⁶ *pertama*, era globalisasi menuntut kemampuan daya saing yang kuat dalam teknologi, manajemen, dan sumber daya manusia; *kedua*, dalam upaya peningkatan mutu, efisiensi, relevansi, dan daya saing yang kuat, pemerintah dalam penyelenggaraan SBI memberikan beberapa landasan yang kuat, yaitu (a) UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 50 ayat 3 yang menyatakan bahwa “pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan. Pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi pendidikan berstandar internasional.”, (b) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), (c) UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2008-2025 yang menetapkan tahapan skala prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ke-1 tahun 2005-2009 yaitu untuk meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan.

Ketiga, penyelenggaraan SBI didasari oleh filosofi *eksistensialisme* dan *esensialisme* (fungsionalisme). *Keempat*, Direktorat PSMP mengelompokkan SMP menjadi empat kelompok, yaitu sekolah rintisan, sekolah potensial, sekolah standar nasional, dan sekolah berstandar internasional. *Kelima*, sejak tahun 2004 Direktorat PSMP telah menetapkan beberapa SMP sebagai sekolah koalisi²⁷ di setiap Provinsi. Dan, *keenam*, pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan beberapasiswa Indonesia mampu bersaing dalam lomba bidang matematika, sains serta bidang-bidang non-akademik tingkat internasional.

Dalam karakteristik esensial sekolah/madrasah ini, menurut Zainal Aqib, sekolah/madrasah harus memiliki keunggulan yang ditunjukkan dengan pengakuan internasional terhadap masukan (*input*), proses (*process*), dan hasil-hasil (*output*) pendidikan dalam berbagai aspek. Pengakuan tersebut dibuktikan

25 M. Agus Nuryatno, *Mazhab Pendidikan Kritis: Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan*, hlm. 61-63

26 Zainal Aqib, *Membangun Prestise Sekolah Berstandar Nasional (SSN) dan Sekolah Berstandar Internasional (SBI)* (Bandung: Yrama Widya, 2010), hlm.74-78

27 Sekolah koalisi adalah SMP yang melaksanakan kerjasama dengan Negara-negara ASEAN dalam berbagai bidang. Lebih lanjut baca Zainal Aqib, *Membangun Prestise Sekolah Berstandar Nasional (SSN) dan Sekolah Berstandar Internasional (SBI)*, hlm.88

dengan sertifikasi berpredikat baik dari salah satu anggota OECD dan atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, diyakini telah memiliki reputasi mutu yang diakui secara internasional, serta lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional. Selain itu, setiap lulusan SBI diharapkan selain menguasai kompetensi dengan SNP di Indonesia, juga menguasai kemampuan-kemampuan kunci negara-negara maju tersebut.²⁸

Sementara dalam pandangan Hill, sebagaimana dikutip Raihani, kriteria sekolah/madrasah sukses (unggul) adalah adanya ide tentang nilai yang ditambahkan sekolah kepada peserta didik, “ketimbang” hanya besaran *outcome*-nya saja. Masih dalam Raihani, Walsh juga mengungkapkan hal yang serupa bahwa sekolah sukses (unggul) adalah sekolah di mana siswa-siswanya menunjukkan perkembangan yang cukup berarti, terlepas dari apakah mereka mencapai standar yang tinggi atau tidak. Dan, menurut Beck dan Murphy, juga dalam Raihani, mengungkapkan bahwa ada empat imperatif bagi sekolah sukses (unggul), yaitu: *pertama*, imperatif untuk mengembangkan pembelajaran secara khusus tidak secara eksklusif hanya untuk siswa, *kedua*, imperatif bagi pribadi-pribadi untuk mengemban tugas-tugas kepemimpinan dan memusatkan energi serta sumber-sumber dari *stakeholder* secara produktif, *ketiga*, imperatif untuk memelihara suasana komunal di dalam sekolah dan menyatukan sekolah dengan masyarakat secara lebih luas dan saling menguntungkan, dan *keempat*, imperatif untuk mendukung usaha-usaha membangun kapasitas staf administrasi, pengajar, dan orang tua sehingga mereka dapat lebih mendukung pembelajaran siswa.²⁹

Sekolah/madrasah unggulan berstandar internasional diharapkan dapat memperbaiki mutu pendidikan bagi generasi penerus bangsa. Maka, sejak 2006, mulailah tampak berdiri RSBI di beberapa kota/kabupaten. Hingga saat ini, menurut catatan Triwiyanto dan Sobri, sekolah RSBI di Indonesia (tahun 2010) berjumlah 1.110 sekolah. Jumlah ini terdiri dari 997 sekolah negeri dan 113 sekolah swasta. Dari jumlah tersebut, jumlah SD RSBI tercatat sebanyak 195 sekolah, SMP RSBI sebanyak 299 sekolah, SMA RSBI sebanyak 321 sekolah, dan SMK RSBI sebanyak 295 sekolah.³⁰

Hal senada juga diungkapkan oleh Ahmadi dan Amri,³¹ secara lebih eksplisit, bahwa tujuan SBI adalah untuk mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif secara internasional. Seperti yang dirumuskan Undang-Undang No.

28 Zainal Aqib, *Membangun Prestise Sekolah Berstandar Nasional (SSN) dan Sekolah Berstandar Internasional (SBI)*, hlm.88

29 Raihani, *Kepemimpinan Sekolah Transformatif*(Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 7-9

30 Teguh Triwiyanto dan Ahmad Yusuf Sobri, *Panduan Mengelola Sekolah Berstandar Internasional*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 44

31 Iif Khoiru Ahmadi dan Sofan Amri, *Strategi Pembelajaran Sekolah Berstandar Internasional dan Nasional* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2010), hlm. 12-13

20 Tahun 2003 dan dijabarkan dalam PP No. 19 Tahun 2005, kemudian dirinci dalam Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) bahwa baik untuk tingkat SD maupun tingkat SMP dan SMU/kejuruan bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Sekolah/Madrasah model ini, kata Triwiyanto dan Sobri adalah proyek prestisius. Sumber dananya berasal dari Pemerintah Pusat sebesar 50 %, Pemerintah Provinsi 35 %, dan Pemerintah Kabupaten/Kota 20 %. Untuk setiap sekolah, Pemerintah Pusat mengeluarkan sekitar Rp. 300-Rp. 600 juta per tahun, paling tidak selama tiga tahun dalam masa rintisan tersebut. Namun, menurut Triwiyanto dan Sobri bahwa sangat disayangkan bahwa sekolah RSBI cenderung elitis dan eksklusif. Mereka mendapatkan perlakuan khusus dengan menerima jumlah subsidi *block-grant* yang tidak sedikit jumlahnya, sekaligus diberikan kebebasan untuk memungut biaya sekolah kepada orang tua/wali murid. Kebebasan untuk memungut biaya sekolah ini pun kemudian banyak menimbulkan persoalan, terutama terkait dengan besaran biaya yang selisihnya jauh dengan sekolah-sekolah non-RSBI. Perbedaan ini kemudian menjadikan sekolah/madrasah unggulan RSBI dilabeli “elitis” dan “eksklusif”.³²

Analisa serupa juga diungkapkan Mudjia Raharjo yang menerangkan bahwa setelah tujuh tahun sejak peraturan yang memayungi pendirian sekolah berstandar internasional tersebut diundangkan, kini sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh tentang kebijakan tersebut. Sebab, kenyataannya pemahaman tentang visi, tujuan, dan manajemen sekolah berstandar internasional sebagaimana maksud semula undang-undang tidak sepenuhnya dipahami baik oleh pihak sekolah maupun pemerintah, seperti contoh menjadikan berbahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pembelajaran sebagai satu-satunya indikator SBI. Yang lebih parah lagi, terjadinya pungutan dana yang jauh dari ukuran kemampuan masyarakat pada umumnya. Sebuah contoh, di sebuah sekolah favorit di sebuah kota ukuran sedang ada orang tua siswa yang sanggup membayar uang masuk sebesar 25 juta rupiah jika anaknya diterima di kelas program internasional. Uang sebesar ini bagi ukuran kantong masyarakat kita adalah di atas kemampuan rata-rata.³³

Dengan kondisi seperti itu, menurut Zainuddin Maliki, bagi siswa yang berasal dari kelas menengah dan apalagi yang berasal dari kelas atas hanya membutuhkan sedikit usaha saja untuk dapat mempertahankan posisi superior di tengah masyarakat. Apalagi pemerintah mengeluarkan dana untuk sekolah-sekolah,

32 Teguh Triwiyanto dan Ahmad Yusuf Sobri, *Panduan Mengelola Sekolah Berstandar Internasional*, hlm. 50

33 H. Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 131-132

pada akhirnya hanya menguntungkan mereka yang kaya untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Dengan pendidikan yang lebih baik, siswa dari kelas menengah dan atas, memperoleh kesempatan lebih luas untuk meraih prestasi dengan segala *reward* yang diperolehnya. Melalui praktek pendidikan sedemikian inilah dimungkinkan berlangsungnya *privelese* dan kesejahteraan bagi kelas elite.³⁴

S. Nasution menyatakan bahwa hal seperti itu terjadi karena golongan sosial sangat menentukan lingkungan sosial seseorang. Pengetahuan, kebutuhan dan tujuan, sikap, watak seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Sistem golongan sosial menimbulkan batas-batas dan rintangan ekonomi, kultural, dan sosial yang mencegah pergaulan dengan golongan-golongan lain. Manusia mempelajari kebudayaannya dari orang lain dalam golongan itu yang telah memiliki kebudayaan tersebut. Maka orang dalam golongan sosial tertentu akan menjadi orang yang sesuai dengan kebudayaan golongan itu dan dengan sendiri mengalami kesulitan untuk memasuki lingkungan sosial lain. Golongan sosial membatasi dan menentukan lingkungan belajar anak.³⁵

Dalam kritik Darmaningtyas juga tersurat hal yang serupa bahwa sebenarnya yang menjadikan siswa menjadi miskin dan bodoh bukan semata-mata kesalahan mereka sendiri, tetapi karena struktur sosial yang sejak awal tidak adil, sehingga tidak memberikan mobilitas horizontal maupun vertikal. Kelompok miskin dan bodoh itu akhirnya terjebak pada lingkaran setan (kemiskinannya). Sayangnya, pendidikan yang seharusnya membuat manusia lebih berkemanusiaan dan berkeadilan, justru semakin melegitimasi dan bahkan menyuburkan ketidakadilan tersebut. Lebih lanjut, bagi anak-anak miskin dan bodoh tersebut, sekolah bukan sarana mobilitas horizontal maupun vertikal yang baik, akan tetapi akumulasi kekecewaan sekaligus arena membangun kesadaran kolektif atas ketidakadilan sosial di masyarakat. Sebab, di sekolah mereka berinteraksi dengan sesama pelajar yang memiliki nasib sama buruknya. Anak-anak yang memiliki nasib lebih baik sudah dikumpulkan tersendiri di sekolah-sekolah swasta dengan status “Diakui”. Sedangkan anak-anak yang memiliki nasib terbaik dikumpulkan tersendiri di sekolah-sekolah negeri favorit maupun sekolah-sekolah swasta dengan status “Disamakan”.³⁶

Selain itu sebagai dampak beban akreditasi SBI ini, terutama dari segi pembiayaannya menjadikan sekolah mencari jalan pintas, yaitu menarik biaya pendidikan lebih tinggi kepada orangtua peserta didik. Padahal, tingginya biaya pendidikan mungkin saja tidak sebanding dengan manfaat yang diterima oleh peserta didik, baik itu manfaat sosial maupun manfaat ekonomi. Manfaat sosial,

34 Zainuddin Maliki, *Sosiologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2008), hlm. 180

35 S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 29

36 Darmaningtyas, *Pendidikan Rusak-Rusakan*, hlm. 340-342

contohnya perilaku kehidupan peserta didik setelah menyelesaikan pembelajarannya, sementara manfaat ekonomi dapat dilihat sebanding atau tidak dengan pendapatan yang diterima seseorang setelah lulus dari sebuah jenjang pendidikan dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikannya.³⁷

Karena itu, maka sekolah/madrasah unggulan menjadi lembaga pendidikan yang mahal. Sekolah/madrasah unggulan menjadi sebuah pranata sosial yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir manusia yang berkantong tebal dan berotak “Habibie”. Mereka (anak-anak) yang kantongnya tipis, tidak didukung oleh finansial yang memadai, kecerdasan yang pas-pasan, dan motivasi yang lemah semakin tertinggal jauh dari pendidikan yang bermutu. Alhasil, agenda pendidikan nasional untuk peningkatan kualitas pendidikan melalui Standar Nasional Pendidikan hanya akan menjadi isapan jempol belaka, bagi masyarakat kecil.

Zainuddin Maliki bahkan menunjukkan sebuah data (meskipun sudah agak lama) yang membenarkan asumsi dan pandangan tersebut. Data itu diambil dari kasus di Indonesia tahun 1990-an. Dari gambaran data berikut dapat diketahui mereka yang memiliki tingkat pendapatan tinggi memperoleh peluang lebih baik dalam mengakses lapangan pendidikan. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik tahun 1992, diketahui tingkat partisipasi pendidikan keluarga dengan pendapatan per kepala keluarga kurang dari Rp. 50 ribu angkanya sebesar 11 %, sedangkan yang berpendapatan di bawah Rp. 50-100 ribu angkanya 19 %, antara 100 ribu hingga 200 ribu angkanya 25 %, dan yang berpendapatan Rp. 200 ribu lebih berjumlah 42 %. Dari data ini tampak ada korelasi antara ekonomi dengan pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendapatan kepala keluarga mereka semakin tinggi tingkat partisipasi mereka dalam pendidikan. Sementara itu, pendidikan merupakan prasyarat memperoleh status sosial yang lebih baik di tengah masyarakat. Konsekuensinya mereka yang rendah pendidikannya, diposisikan masyarakat dalam lapisan sosial di bawah.³⁸

Problem selanjutnya yang akan muncul adalah ketika dilihat bagaimana hubungan mereka yang beruntung (masuk di sekolah/madrasah unggulan dan berstandar internasional) meraih status sosial yang lebih baik, dengan mereka yang tidak beruntung (masuk di sekolah biasa [standar atau bahkan di bawah standar] dan tidak punya prestasi) . Hal ini didasari karena pola relasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dalam pandangan teori konflik, terutama didasarkan kepada proses eksploitasi, opresi, dominasi, dan subordinasi. Dengan demikian mereka yang lebih beruntung, memperoleh kesejahteraan, pendidikan yang lebih beruntung, memperoleh kesejahteraan, pendidikan dan status sosial, cenderung

37 Teguh Triwiyanto dan Ahmad Yusuf Sobri, *Panduan Mengelola Sekolah Berstandar Internasional*, hlm. 56

38 Zainuddin Maliki, *Sosiologi Pendidikan*, hlm. 176

mengendalikan, dan bahkan melakukan eksploitasi, opresi, dan dominasi terhadap mereka yang tidak beruntung.³⁹

Jika melihat realitas pendidikan (Islam) di Indonesia tersebut, menurut M. Agus Nuryatno, nampak jelas bahwa pendidikan menjadi sebatas kekuatan reproduktif, belum menjadi kekuatan produktif. Ini terlihat dari adanya perbedaan yang tajam antara sekolah yang bagus dan mahal (mayoritas dihuni oleh anak dari golongan menengah ke atas) dengan sekolah yang kualitasnya pas-pasan dan murah (mayoritas dihuni oleh golongan bawah). Saat ini hampir sulit ditemukan sekolah negeri yang bagus, apalagi swasta, dari tingkat sekolah dasar atau madrasah diniyah sampai perguruan tinggi yang tidak mahal. Di masa lalu masih terdapat sekolah-sekolah negeri yang bagus dan bisa dijangkau oleh orang kebanyakan. Sekarang kondisinya berbeda. Sekolah-sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah unggulan sekarang ini tidak ada yang berbiaya murah. Padahal ini adalah sekolah-sekolah negeri. Kalau sekolah swasta mahal bisa dimengerti karena keberlangsungannya lebih banyak tergantung kepada SPP murid. Namun, kalau sekolah negeri mahal pasti ada sesuatu yang salah karena ia disubsidi oleh pemerintah.⁴⁰

Kondisi sekolah/madrasah unggulan yang elitis tersebut, menurut Mu'arif, (tidak lain) disebabkan karena demokrasi dalam konteks pendidikan belum sepenuhnya terwujud. Bahkan, bisa dikatakan bahwa pendidikan belum mencerminkan atas kekuasaan rakyat semesta. Jika semisal disepakati bahwa sistem demokrasi itu bermuara pada seluruh kepentingan rakyat, maka penyelenggaraan pendidikan nasional harus benar-benar mencerminkan dari kebutuhan rakyat itu. Namun, kenyataannya sekarang ini, pendidikan bukan lagi menjadi kepentingan rakyat. Dengan penyelenggaraan pendidikan yang terlampau mahal, rakyat jelata justru "mati sekarat" karena tidak kuasa menanggung biaya. Banyak cerita menyedihkan dalam kehidupan rakyat jelata yang tidak sanggup lagi menanggung biaya sekolah anak mereka. Kasus bunuh diri ibu Suwarni, seorang warga Bekasi dan Haryanto, seorang siswa SD Muara Sanding IV Garut, menjadi potret buram sejarah pendidikan nasional.⁴¹

Kemudian, jika pengembangan sekolah/madrasah unggulan SBI ini di-*qiyas*-kan dengan pembentukan Badan Hukum Pendidikan (meskipun pada akhirnya kebijakan ini dibatalkan) dengan penerimaan jalur mandiri sebagai salah satu wahananya, maka menurut pendapat Mu'arif bahwa sekolah/madrasah unggulan SBI adalah representasi dari kelompok kaum elite kaya yang hanya akan mempertajam perbedaan dan pertentangan kelas. Bahkan, lebih lanjut akan

39 *Ibid.*, hlm. 177

40 M. Agus Nuryatno, *Mazhab Pendidikan Kritis: Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan*, hlm. 64-65

41 Mu'arif, *Liberalisasi Pendidikan: Menggadaikan Kecerdasan Kehidupan Bangsa*, (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2008), hlm. 110-111

menyebabkan kecemburuan sosial dikarenakan posisi marginalnya kaum miskin dengan belajar hanya di sekolah/madrasah biasa (standar atau bahkan di bawah standar). Sudah barang tentu mereka yang mengenyam pendidikan di sekolah/madrasah unggulan SBI akan merasa superior, sementara kaum miskin yang menempati sekolah/madrasah “biasa” akan merasa inferior. Dengan demikian, pendidikan nasional dengan agenda barunya berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 itu hanya akan menciptakan elitisme pendidikan nasional.⁴²

Skeptisme tersebut menurut teoritis Marxian, semakin menguatkan pandangan bahwa pendidikan adalah instrumen pemilik modal. Mereka itulah yang mengendalikan proses rekrutmen pendidikan, melakukan seleksi dan alokasi peran, di samping memanipulasi publik agar mengesahkan *privelese* yang dimiliki para pemilik modal.⁴³

Selain itu, potensi lain yang bisa muncul adalah sekolah/madrasah unggulan akan berpeluang besar menjadi ajang komersialisasi. Karena, faktor kecukupan ekonomi dan kemampuan akademik yang mendukung, menurut Mu'arif, format pendidikan sekolah/madrasah unggulan SBI berpeluang besar menjadi ajang bisnis bagi kaum kapitalis. Dengan dalih meningkatkan kualitas dan profesionalisme dengan pembenahan fasilitas-fasilitas yang serba mahal, maka pendidikan akan disulap menjadi ajang “bisnis intelektual” (komersialisasi) yang cukup menggiurkan. Jika pendidikan telah menjadi ajang komersialisasi, maka visi dan orientasi sosialnya telah hilang, tenggelam bersama kepentingan bisnis yang hanya memandang antara dua pilihan, untung atau rugi.⁴⁴

Hal itu juga semakin memperjelas bahwa perkembangan sekolah/ madrasah unggulan SBI sesungguhnya bisa memicu tumbuhnya kesenjangan sosial di masyarakat. Tumbuhnya pendidikan yang elitis dalam sekolah/madrasah unggulan ini dapat memicu konflik. Seperti dikatakan Marx sebagaimana dikutip Zaenuddin Maliki,⁴⁵ bahwa perbedaan atas sarana tidak selalu menjadi penyebab pertikaian antar kelas. Tetapi, ia membenarkan bahwa *gap* golongan/kelas masyarakat mempunyai cara khas yang dapat menimbulkan konflik antar kelas karena masyarakat secara sistematis menghasilkan perbedaan pendapat antara orang-orang yang berbeda tempat atau posisinya di dalam suatu struktur sosial dan lebih penting lagi dalam hubungannya dengan sarana produksi. Damsar melihat itu sebuah keniscayaan, karena struktur itu memiliki konflik jika dilihat dari perspektif teori struktural konflik.⁴⁶

42 *Ibid.*, hlm. 178

43 Zainuddin Maliki, *Sosiologi Pendidikan...*, hlm. 176

44 Mu'arif, *Liberalisasi Pendidikan: Menggadaikan Kecerdasan Kebudayaan Bangsa*, hlm., hlm. 178-179

45 Zainuddin Maliki, *Sosiologi Pendidikan*, hlm. 173

46 Dalam teori struktural konflik setiap struktur dipandang memiliki berbagai elemen yang berbeda. Elemen yang berbeda ini memiliki motif, maksud, kepentingan, atau tujuan yang berbeda-beda

Kemudian, ketika keduanya (klas atas dan klas bawah) terjadi pertentangan klas, revolusi menjadi kuliminasinya. Tidak hanya itu, sekolah/madrasah bahkan akan menjadi ajang bisnis yang pada akhirnya, pendidikan yang humanis dan egaliter pun tinggal mimpi bagi kaum jelata. Peradaban umat manusia kemudian hanya akan diisi oleh golongan orang-orang yang beruntung.

Rekonstruksi Pendidikan Sekolah/Madrasah Unggulan SBI yang Kritis dan Egaliter

Sebagai langkah lanjut dalam membenahi fenomena pendidikan elitis dalam sekolah/madrasah unggulan tersebut maka upaya yang bisa dilakukan, salah satunya, yakni dengan merekonstruksi pendidikan sekolah/madrasah unggulan berstandar internasional itu menjadi sekolah/madrasah unggulan yang kritis, egaliter, dan bisa dinikmati semua kalangan masyarakat. Untuk itu, maka menurut Herbert Kliebard, isu konflik (dan kompromi) antar kelompok yang berakar pada perbedaan pandangan tentang ras, klas, dan gender harus ikut menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan pendidikan.⁴⁷

Sementara dalam pandangan M. Agus Nuryatno, dengan mendasarkan pada kritik terhadap teori reproduksi yang memiliki beberapa kelemahan, yaitu *pertama*, ia tidak mampu menjelaskan fakta mengapa ada anak dari golongan kelas bawah mampu beranjak dari kelasnya menjadi menengah atau atas ketika mereka beranjak dewasa atau sebaliknya, *kedua*, teori ini hanya menjelaskan proses reproduksi dari satu sudut pandangan, atau monolitik, seolah-olah guru dan murid adalah partisipan pasif dalam proses tersebut, padahal hubungan kekuasaan antara yang dominan dan kelompok subordinat itu bersifat asimetris. Dan, *ketiga*, ia tidak menawarkan sekolah sebagai medium bagi penyemaian kesadaran kritis yang diperlukan sebagai upaya untuk mengkritisi struktur sosial yang ada. Maka dari itu, agar sekolah/madrasah tidak menjadi ajang reproduksi sosial saja maka lembaga pendidikan tersebut harus diarahkan untuk memproduksi sistem sosial yang baru dan adil. Bagaimana sekolah dapat berperan dalam memperpendek jurang kelas sosial di masyarakat. Tidak ada pilihan lain untuk merealisasikan ini kecuali menjadikan sekolah sebagai *productive force*, bukan *reproductive force*, tegas Nuryatno.⁴⁸

pula. Perbedaan ini memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi, konflik, dan perpecahan. Setiap struktur terbangun didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas anggota yang lain. Selengkapnya baca Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 55

47 Zainuddin Maliki, *Sosiologi Pendidikan*, hlm. 193

48 M. Agus Nuryatno, *Mazhab Pendidikan Kritis: Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan*, hlm. 63-64

Selanjutnya, Zainuddin Maliki mengatakan jika teori konflik yang digunakan sebagai perspektifnya maka perlu ada reformasi kurikulum di sekolah/madrasah unggulan tersebut, sehingga kurikulum terdesain untuk memberi pengetahuan kepada peserta didik, materi pelajaran yang bisa menumbuhkan kesadaran kelas, kesadaran melawan opresi dan eksploitasi kelas dominan. Pendidik harus memiliki komitmen membangkitkan dan memberdayakan peserta didik, agar nantinya bisa terjun ke tengah masyarakat sebagai agen pemberdayaan dan pembebasan masyarakat lemah dari dominasi budaya dan politik kelompok masyarakat yang kuat. Adapun strategi perencanaan dalam pendidikan dimulai dengan menetapkan prioritas kebijakan, mereformasi kurikulum, dan melakukan pembelajaran yang menekankan kemampuan melakukan penemuan, penelitian atau *enquiry* secara kritis.⁴⁹

Untuk persoalan di atas, melihat tujuan awal yang hampir sama dengan konteks tujuan yang dihadapi Paulo Freire (yaitu untuk mengubah ketidakadilan yang menimpa kelas-kelas subordinat, dengan prinsip bahwa pendidikan adalah sebuah syarat yang diperlukan, meskipun tidak sepenuhnya mencukupi, untuk melakukan transformasi sosial), menurutnya ada beberapa prioritas yang perlu dilakukan dalam merekonstruksi pendidikan sekolah/madrasah unggulan tersebut, yaitu: *pertama*, demokratisasi dan akses untuk masuk sekolah, dan *kedua*, demokratisasi administrasi sekolah.⁵⁰

Selanjutnya, kata Mu'arif, agenda demokratisasi pendidikan tidak cukup hanya dengan mengkritisi secara struktural seputar kebijakan (*policy*) berkenaan dengan pendidikan. Meskipun kebijakan pemerintah itu sangat menentukan, akan tetapi persoalan yang paling prinsipil adalah masalah sistem pendidikan. Maksudnya, sistem pendidikan itu meliputi paradigma, tujuan, kurikulum, metode, strategi dan sebagainya berkaitan dengan agendak praksisnya. Untuk itu, partisipasi dari seluruh rakyat harus diperjelas dan diposisikan sebagai subjek aktif. Yakni posisi subjek yang menyadari betul akan arti penting pendidikan tersebut. Dengan demikian rakyat Indonesia telah melampaui fase kesadaran dari naif (atau mungkin magis) menuju kritis-transformatif. Selain itu, untuk bisa mewujudkan demokratisasi pendidikan, paradigma pendidikan nasional harus bervisi kerakyatan. Pendidikan yang bervisi kerakyatan adalah pengejawantahan dari paradigma pendidikan kritis (*critical education*).⁵¹

Adapun agenda demokratisasi pendidikan bisa digarap melalui, *pertama*, kebijakan pemerintah yang mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Dan, dengan dukungan kebijakan tersebut, langkah *kedua*, yaitu pendidikan

49 Zainuddin Maliki, *Sosiologi Pendidikan*, hlm. 193

50 Paulo Freire, *Pendidikan Masyarakat Kota*, Diterjemahkan oleh: Agung Prihantoro (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. 142-143

51 Mu'arif, *Liberalisasi Pendidikan: Menggadaikan Kecerdasan Kehidupan Bangsa*, hlm., hlm. 111-112

nasional harus segera berbenah diri dengan mengusung paradigma kritis yang senafas dengan arah demokrasi, bukan yang condong ke arah feodalisme, elitisme, bahkan kapitalisme, sehingga rakyat kecil tidak bisa menikmatinya.⁵²

Selain itu, pendidikan (baik di sekolah/madrasah), kata Abdul Munir Mulkhan, semestinya dilakukan bagi kepentingan peserta didik, bukan guru, penguasa, pengelola, dan pemilik atau pengelola. Pandangan pendidikan sebagai transfer nilai, ilmu, dan kemampuan kerja, bukanlah pandangan arif dan realistik. Hal ini lebih mencerminkan romantisme hegemoni sejarah tentang masa lalu dan generasi pendahulu yang selalu lebih baik. Sejarah dipandang selesai, beku, dan mati, melawan fakta tentang keberlangsungan perubahan sosial sebagai hukum sejarah.⁵³ Kemudian, perlu pula dilakukan kritik dan peninjauan ulang secara radikal terhadap konsep, maksud, tujuan, dan proses pelaksanaan pendidikan yang selama ini ada. Melalui kritik seperti ini, akan terbuka peluang bagi pengembangan konsep dan praktek pendidikan yang lebih memihak peserta didik dan rakyat yang mayoritas petani, tinggal di pedesaan, dan miskin.⁵⁴

Ketersediaan semua pihak, terutama para penguasa, pemilik lembaga pendidikan, pengelola, guru, dan para ahli didik, untuk melakukan kritik secara radikal terhadap persoalan pendidikan, merupakan langkah awal bagi upaya memperbaiki pendidikan bagi rakyat. Maksud utama pendidikannya kemudian adalah pengembangan pemahaman dan penyadaran peserta didik atas dunia empirik yang mereka alami dan dunianya di masa mendatang. Tujuannya adalah kemampuan peserta didik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya hari ini, di saat mereka menjalani pendidikan, dan pada masa hidupnya nanti dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup masyarakatnya secara luas.⁵⁵

Oleh karena itu, pendidikan (di sekolah/madrasah berstandar internasional) harus berupaya memperkaya pengalaman peserta didik memahami, memecahkan, dan berperan aktif dalam dunianya sendiri, bukan dunia guru, penguasa, dan pemilik atau pengelola pendidikan. Proses pembelajaran dikembangkan sesuai dunia peserta didik dan dunia yang diprediksi akan terjadi dan dialami nanti di masa depan.

Dalam hal ini, Abdul Munir Mulkhan berpendapat, pemerintah memiliki fungsi utamanya, melalui Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang: Kemendikbud), yaitu hendaknya dikembangkan guna mendorong dan memfasilitasi terbukanya peluang bagi masyarakat warga dalam melakukan peran pendidikan secara lebih

52 *Ibid.*, 112-113

53 Abdul Munir Mulkhan, *Nalar Spiritual Pendidikan: Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 214

54 *Ibid.*, hlm. 215

55 *Ibid.*, hlm. 215

mandiri dan kreatif. Selain itu, lembaga keagamaan yang selama ini menempatkan pendidikan sebagai sebagian kegiatan utamanya, harus lebih aktif mengambil peran pendidikan tersebut, tanpa harus menunggu niat baik pemerintah yang biasanya enggan melepaskan kekuasaannya di bidang ini.⁵⁶

Sementara itu, menurut Darmaningtyas, jalan yang bisa dilalui untuk merekonstruksi pendidikan (Islam) pada sekolah atau madrasah unggulan agar bisa menjadi sarana mobilitas sosial menuju kehidupan yang lebih sejahtera, mencerdaskan, dan berkeadilan, maka kebijakan pendidikan nasional yang tidak adil itu jelas perlu diubah agar lebih adil dan manusiawi. Negara tidak boleh hanya memfasilitasi kelompok-kelompok mampu saja, tetapi semua kelompok-kelompok masyarakat wajib difasilitasi. Konsekuensi dari sikap politis yang semacam itu adalah, semua kebijakan yang tidak mendukung terciptanya sistem yang adil tersebut harus digugat dan diubah agar menjadi lebih berkeadilan. Negara wajib menerapkan kebijakan *affirmative action* guna menampung anak-anak yang miskin dan bodoh tersebut. Caranya, negara memberikan alokasi ruang yang cukup bagi kaum miskin dan bodoh itu untuk bisa bersekolah di sekolah-sekolah/madrasah-madrasah negeri.⁵⁷

Dalam sistem penerimaan siswa baru, perlu diterapkan kebijakan baru yang tidak hanya menggunakan sistem tunggal dalam bentuk tes ujian masuk, tetapi juga mendasarkan pada kemampuan sosial ekonomi calon murid. Negara dalam hal ini wajib mendorong masyarakat agar mereka yang secara ekonomis mampu lebih baik memilih sekolah di swasta, sehingga semakin banyak ruang yang tersedia di sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah negeri bagi golongan miskin dan bodoh. Dan, *affirmative action* ini tidak hanya untuk tingkat sekolah dasar dan menengah saja, tetapi juga pendidikan tinggi negeri. Sebab, tanpa kebijakan *affirmative action*, sulit dibayangkan anak-anak yang miskin dan bodoh itu akan mengenyam pendidikan tinggi, karena sistem yang ada tidak memberikan jalan sedikit pun kepada mereka. Padahal kalau mereka difasilitasi, sangat mungkin kepandaian mereka akan meningkat tajam. Karena, kebodohan mereka lebih disebabkan oleh ketiadaan fasilitas yang mendukungnya.⁵⁸

Dengan berbagai pembahasan di atas, maka upaya rekonstruksi pendidikan sekolah/madrasah unggulan berstandar internasional agar tidak elitis adalah perlu dilakukannya beberapa hal sebagai berikut: *pertama*, dalam pengembangan sekolah/madrasah unggulan berstandar internasional harus turut mempertimbangkan isu-isu konflik (dan kompromi) antar kelompok yang berakar pada perbedaan

56 Abdul Munir Mulkhan, *Nalar Spiritual Pendidikan: Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam*, hlm. 216.

57 Darmaningtyas, *Pendidikan Rusak-Rusakan*, hlm. 245-346

58 *Ibid.*, hlm. 345-346

pandangan tentang ras, kelas, dan gender. *Kedua*, melakukan redesain kurikulum di sekolah/madrasah unggulan berstandar internasional dengan kurikulum yang mampu memberi pengetahuan dan materi pelajaran yang bisa menumbuhkan kesadaran kelas, kesadaran melawan opresi dan eksploitasi kelas dominan. Pendidik harus memiliki komitmen membangkitkan dan memberdayakan peserta didik, agar nantinya bisa terjun ke tengah masyarakat sebagai agen pemberdayaan dan pembebasan masyarakat lemah dari dominasi budaya dan politik kelompok masyarakat yang kuat.

Ketiga, memprioritaskan demokratisasi dan akses untuk masuk sekolah serta demokratisasi administrasi sekolah. *Keempat* yaitu pengembangan pendidikan di sekolah/madrasah unggulan harus diarahkan pada visi kerakyatan yang merupakan pengejawantahan dari paradigma pendidikan kritis (*critical education*). *Kelima*, melakukan kritik secara radikal terhadap persoalan pendidikan dengan pengembangan pemahaman dan penyadaran peserta didik atas dunia empirik yang mereka alami dan dunianya di masa mendatang. *Keenam*, menjadikan sekolah/madrasah unggulan sebagai *productive force*, bukan *reproductive force*. Dan, *ketujuh*, pemerintah hendaknya menerapkan kebijakan *affirmative action* guna menampung anak-anak yang miskin dan bodoh pada sekolah/madrasah unggulan berstandar internasional tersebut.

Simpulan

Dari hasil kajian tentang fenomena pendidikan elitis dalam sekolah/madrasah berstandar internasional ini pada makalah ini dapat diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut: *pertama*, fenomena pendidikan elitis muncul dalam sekolah/madrasah unggulan berstandar internasional disebabkan oleh beberapa hal di antaranya, karena sekolah/madrasah ini mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah dengan menerima jumlah subsidi *block-grant* yang tidak sedikit jumlahnya, sekaligus diberikan kebebasan untuk memungut biaya sekolah kepada orang tua/wali murid. Karena, kebebasan untuk memungut biaya sekolah ini kemudian banyak menimbulkan persoalan, terutama terkait dengan besaran biaya yang selisihnya jauh dengan sekolah-sekolah non-RSBI.

Hal ini kemudian memicu munculnya pendidikan yang elitis di sekolah/madrasah unggulan berstandar internasional. Selain itu, penyebab lainnya adalah karena hubungan mereka yang beruntung (masuk di sekolah/madrasah unggulan dan berstandar internasional) meraih status sosial yang lebih baik, dengan mereka yang tidak beruntung (masuk di sekolah biasa dan tidak punya prestasi). Hal ini didasari karena pola relasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dalam pandangan teori konflik, terutama didasarkan kepada proses eksploitasi, opresi, dominasi, dan subordinasi. Dengan demikian mereka yang lebih beruntung, memperoleh

kesejahteraan, pendidikan yang lebih beruntung, memperoleh kesejahteraan, pendidikan dan status sosial, cenderung mengendalikan, dan bahkan melakukan eksploitasi, opresi, dan dominasi terhadap mereka yang tidak beruntung.

Selain itu, sebab lainnya adalah sekolah/madrasah tersebut bukan sarana mobilitas horizontal maupun vertikal yang baik, akan tetapi justru merupakan akumulasi kekecewaan sekaligus arena membangun kesadaran kolektif atas ketidakadilan sosial di masyarakat. Dan, terakhir pendidikan pada sekolah/madrasah unggulan berstandar internasional tersebut telah menjadi sebatas kekuatan reproduktif, belum menjadi kekuatan produktif.

Kedua, melihat adanya indikasi fenomena pendidikan elitis di sekolah/madrasah unggulan berstandar internasional tersebut yang kuat dan bisa berakibat buruk bagi masa depan bangsa dan negara ini, terutama kalangan rakyat kecil, maka perlu diupayakan beberapa langkah rekonstruksi untuk memperbaiki pendidikan sekolah/madrasah unggulan tersebut agar bisa dinikmati secara merata oleh seluruh kalangan masyarakat serta bisa mencerdaskan seluruh anak bangsa, sebagai berikut: turut mempertimbangkan isu-isu konflik (dan kompromi) antar kelompok yang berakar pada perbedaan pandangan tentang ras, klas, dan gender dalam pengembangan sekolah/madrasah unggulan berstandar internasional; melakukan redesain kurikulum di sekolah/madrasah unggulan berstandar internasional dengan kurikulum yang mampu memberi pengetahuan dan materi pelajaran yang bisa menumbuhkan kesadaran klas, kesadaran melawan opresi dan eksploitasi klas dominan; memprioritaskan demokratisasi dan akses untuk masuk sekolah serta demokratisasi administrasi sekolah; pengembangan pendidikan di sekolah/madrasah unggulan harus diarahkan pada visi kerakyatan yang merupakan pengejawantahan dari paradigma pendidikan kritis (*critical education*); melakukan kritik secara radikal terhadap persoalan pendidikan dengan pengembangan pemahaman dan penyadaran peserta didik atas dunia empirik yang mereka alami dan dunianya di masa mendatang; menjadikan sekolah/madrasah unggulan sebagai *productive force*, bukan *reproductive force*, dan terakhir, dalam bidang pendidikan ini, pemerintah hendaknya menerapkan kebijakan *affirmative action* guna menampung anak-anak yang miskin dan bodoh pada sekolah/madrasah unggulan berstandar internasional.

Demikianlah akhir dari artikel ini, semoga bermanfaat dan dapat berkontribusi bagi pembenahan dan pengembangan pendidikan nasional pada umumnya, dan pendidikan Islam, terutama pada sektor madrasah dan atau sekolah (Islam) pada khususnya sehingga akan membawa perbaikan kualitas sumber daya manusia di tanah air. Dan, penulis menyadari akan suatu pepatah yang mengatakan “Tiada Gading yang Tak Retak” maka melalui media ini, maka jika ada kekurangsempurnaan dalam makalah ini mohon kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan.

Rujukan

- Ahmadi, Iif Khoiru, dan Sofan Amri, *Strategi Pembelajaran Sekolah Berstandar Internasional dan Nasional*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2010.
- Aqib, Zainal, *Membangun Prestise Sekolah Berstandar Nasional (SSN) dan Sekolah Berstandar Internasional (SBI)*, Bandung: Yrama Widya, 2010.
- Bahrudin, "Pendidikan untuk Keberdayaan Desa", dalam A. Ferry T. Indratno, *Kurikulum yang Mencerdaskan: Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008.
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Darmaningtyas, *Pendidikan Rusak-Rusakan*, Yogyakarta: LKiS, 2009, Cet. IV.
- Direktorat Pendidikan Madarrasah, "Arah Kebijakan Pengembangan Madrasah di Indonesia", *Laporan Dtpenmad Dit PI*, 2006.
- Erfina, Eka Yani, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, Surabaya: Tiga Dua, t.th.
- Freire, Paulo, *Pendidikan Masyarakat Kota*, Diterjemahkan oleh: Agung Prihantoro, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Heryanto, Ariel, "Industrialisasi Pendidikan: Berkah, Tantangan, atau Ancaman bagi Indonesia?" dalam Sindhunata (Ed.), *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokrasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- <http://minmalang1.net/pmb.php>. [9 Desember 2011]
- <http://psb.sdmuhsapen-yog.sch.id/content.php?id=91> [9 Desember 2011]
- http://www.al-azhar.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=94:sd-islam-al-azhar-1&catid=106:sd-islam-al-azhar&Itemid=82 [9 Desember 2011]
- <http://www.mpuin-jkt.sch.id/content/view/37/170/> [9 Desember 2011]
- Maimun, H. Agus, dan Agus Zaenul Fitri, *Madrasah Unggulan: Lembaga Pendidikan Alternatif di Era Kompetitif*, Malang: UIN Malang Press, 2010.
- Maliki, Zainuddin, *Sosiologi Pendidikan*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2008.

- Mu'arif, *Liberalisasi Pendidikan: Menggadaikan Kecerdasan Kehidupan Bangsa*, Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2008.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Nalar Spiritual Pendidikan: Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Naim, Ngainun, *Rekonstruksi Pendidikan Nasional: Membangun Paradigma yang Mencerahkan*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Nasution, S., *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Nuryatno, M. Agus, *Mazhab Pendidikan Kritis: Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Resist Book, 2008.
- Rahardjo, H. Mudjia, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Raihani, *Kepemimpinan Sekolah Transformatif*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Diterjemahkan oleh: Alimandan, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Soedijarto, H., "Pendidikan yang "Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia", dalam A. Ferry T. Indratno, *Kurikulum yang Mencerdaskan: Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008.
- Triwiyanto, Teguh, dan Ahmad Yusuf Sobri, *Panduan Mengelola Sekolah Berstandar Internasional*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.

PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL PENDIDIKAN ISLAM (JPI) FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Naskah-naskah yang dikirimkan ke redaksi Jurnal Pendidikan Islam (JPI) akan dipertimbangkan pemuatannya apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat ilmiah, berupa kajian dan pengembangan pendidikan Islam, gagasan orisinal, ringkasan hasil penelitian/survei, atau bentuk tulisan lainnya yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan studi dan pemikiran pendidikan Islam
2. Naskah yang dikirim merupakan naskah yang belum pernah dipublikasikan dalam penerbitan apapun atau tidak sedang diminta penerbitannya oleh media lain.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing (Inggris/Arab) yang memenuhi kaidah-kaidah penulisan bahasa Indonesia atau asing (Inggris/Arab) yang baik dan benar.
4. Setiap naskah ditulis secara berurutan terdiri dari judul, nama penulis, identitas penulis (lembaga dan e-mail penulis), abstrak, kata kunci, isi, dan rujukan.
5. Judul harus ringkas, spesifik dan efektif, tidak melebihi 12 kata yang menggunakan Bahasa Indonesia, 10 kata yang menggunakan Bahasa Inggris.
6. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab atau Inggris. Abstrak ditulis antara 100-150 kata dengan memuat latar belakang masalah, tujuan, dan kesimpulan.
7. Kata kunci maksimal 4 kata yang mencerminkan isi naskah.
8. Isi naskah terdiri dari 5000 s.d. 6000 kata atau 20 s.d. 25 halaman kertas ukuran kwarto diketik dengan spasi satu setengah.
9. Naskah ditulis dengan menggunakan *footnote* (catatan kaki) yang memuat nama penulis, judul buku/majalah/jurnal diketik miring, kota tempat penerbitan, nama penerbit, tahun penerbitan, dan halaman.
10. Rujukan disusun secara alfabetis dengan memuat nama penulis, judul buku/jurnal/majalah diketik miring, kota tempat penerbitan, nama penerbit dan tahun terbit.
11. Naskah diketik dalam bentuk Microsoft Word dengan format RTF (Rich Text Format) atau Doc. (Word Document) dikirim langsung ke redaksi atau melalui e-mail: jurnaljpi@yahoo.co.id dengan menggunakan *attachment file*.

12. Tidak keberatan jika naskah yang dikirim mengalami penyuntingan atau perbaikan tanpa mengubah isinya.
13. Setiap naskah yang masuk ke redaksi dikategorikan dalam tiga kriteria: diterima tanpa revisi, diterima dengan revisi, atau ditolak.
14. Naskah yang dimuat akan diberitahukan kepada penulis via e-mail.
15. Naskah yang dimuat akan diberi apresiasi dan mendapatkan *Jurnal Pendidikan Islam*.

Jurnal Pendidikan Islam (JPI)

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Lt. III Ruang 315

UIN Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Indonesia

Telp. +62-274-513056

E-mail: jurnaljpi@yahoo.co.id